

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, disajikan literatur yang menjadi dasar bagi kerangka pemikiran dan pengujian dan hipotesis. Bab ini dimulai dengan memberikan tinjauan pustaka yang menggambarkan konsep dasar yang akan menjadi subjek penelitian, diikuti dengan penelitian sebelumnya, dan akhirnya kamu menyajikan kerangka hipotesis yang menguraikan model penelitian serta berisikan hipotesis-hipotesis yang akan diuji

##### **2.1.1 Kajian Teori**

###### **2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Halim (2004 : 96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah bersumber dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007:67) unsur-unsur pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota antara lain:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dan
- g. Pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 Jenis retribusi jasa umum dan 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
- b. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007:68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah,
- 2) Bagian lembaga keuangan bank,
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non Bank
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal dan investasi

4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2007:69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan,
- 2) Penerimaan jasa giro,
- 3) Penerimaan bunga deposito,
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

### **2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung per kapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Dimana ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

a) Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yaitu jumlah riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fisik) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar.

b) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti: semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

c) Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara baru atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau

membangun rumah. Suatu kemajuan teknologi dikatakan mempunyai sifat yang netral jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi dari kualitas dan kombinasi input yang sama.

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi paling optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat yang luas. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat teori-teori dari para tokoh ekonomi diantaranya:

### a. Teori Ekonomi Klasik

Orang yang pertama membahas pertumbuhan secara sistematis adalah Adam Smith yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*". Ini dalam buku Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisien yang membawa ekonomi sampai kepada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Kebijakan pasar bebas dan pengurangan campur tangan pemerintah (*laissez faire*) dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut karena adanya campur tangan pemerintah hanya akan mengganggu bekerjanya mekanisme pasar.

Adam Smith membagi tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan yaitu: masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori Adam Smith, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang kapitalis. Dalam prosesnya pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang bekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan karakteristik satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupuk modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu terbatasnya sumber daya ekonomi.

Dalam pemikiran Smith, pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian karena tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.

#### b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik ini dikemukakan oleh Solow-Swan yang menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan besarnya fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja.

Menurut teori Solow-Swan, mekanisme pasar biasanya menghasilkan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mengontrol atau mempengaruhi pasar. Intervensi pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini membuat teori mereka dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan pemikiran teori neo-klasik. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi-teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitasnya per kapita meningkat.

Modal neo-klasik sangat memperhatikan kemajuan teknologi yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; kualitas SDM mencakup keahlian dan moral. Oleh karena itu, agar produktivitas per tenaga kerja terus meningkat, pemerintah harus mendorong kreativitas dalam masyarakat.

#### 3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana dari indikator tersebut dapat

digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atas tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, pendapatan per kapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang memiliki pendapatan per kapita meningkat dari pada periode sebelumnya.

b. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan tenaga kerja, suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaganya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga di tandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **2.1.1.3 Kendaraan Bermotor**

#### **1. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Pasal 1 angka 3 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 7 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum menurut Pasal 1 angka 10 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayarkan.

#### **2. Karakteristik Kendaraan Bermotor**

Menurut (MKJI,1997) kendaraan yang berpotensi di jalan raya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:

- a. Kendaraan ringan (LV), kendaraan bermotor dengan 4 roda dan dengan jarak as 2,0-3,0 m (meliputi : mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up dan truck kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga)
- b. Kendaraan Berat (HV), kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda (meliputi bis, truck 2 as, truck 3 as, dan truck kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

- c. Kendaraan Bermotor (MC), kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).
- d. Kendaraan tak bermotor (UM), Kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan (meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

### 3. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Muqodim (1999:122) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### A. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor, yaitu:
  - Kereta api
  - Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
  - Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
  - Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan
  - Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk kepentingan pameran dan tidak untuk dijual
2. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
3. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

#### **2.1.1.4 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang di peruntukan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana. Menurut Ariadi, (39:2021) belanja modal adalah belanja untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja modal adalah seluruh belanja pemerintah daerah yang mencakup dua jenis belanja yakni bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan yang akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah seperti biaya pemeliharaan pada kelompok administrasi umum yang bagian dari belanja yang bersifat rutin dimana manfaatnya melebihi satu anggaran.

##### **a. Peran Belanja Modal**

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah yang dimana dalam pelaksanaannya untuk pembentukan modal. Pembentukan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, binatang dan lain sebagainya. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin

tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

#### b. Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Syaiful (2006), jenis-jenis belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

##### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengurukan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sampai tanah tersebut siap digunakan.

## 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta manfaatnya lebih dari satu tahun.

## 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.

## 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/penggantian/peningkatan/pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.

## 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/penggantian/pembangunan/pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku serta jurnal ilmiah.

## 2.1.2 Kajian Empiris

### 2.1.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut “Pendapatan Asli Daerah”. Melakukan penelitian harus ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, maka pada bagian ini diberikan penjelasan beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ms, M Zahari. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2004- 2013	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dan data yang digunakan merupakan data <i>time series</i> .	Variabel jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal pada Provinsi DKI Jakarta.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.15 No.4 Tahun 2015. (Online)
2	Hasanur, et al. (2017) Pengaruh Jumlah Penduduk	Menganalisis pengaruh	Variabel jumlah kendaraan bermotor dan	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh	Jurnal E- KOMBIS, vol III, No.2 2017. (online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Kawasan Barat Selatan Aceh)	pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan model analisis regresi berganda.	belanja modal pada Provinsi DKI Jakarta	signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/ Kota Kawasan Barat Selatan Aceh	
3	Wadjaudje, DU, et al. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2016	Menganalisis pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah serta menggunakan model analisis regresi berganda.	Investasi dan Jumlah Wisatawan sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel jumlah kendaraan bermotor.	Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik (JKEP): Vol.5, No.2-Desember 2018. (Online)
4	Rahman, Arief & Restiatun, (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah kendaraan bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022	Menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.	Variabel jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka serta menggunakan analisis regresi data panel dan model <i>random effect</i> .	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022	Sebatik Vol.27 No.2 Desember 2023. (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Darwanis & Saputra, R, (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.	Variabel Kinerja Keuangan dan menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening yaitu analisis jalur ( <i>path analysis</i> )	Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh	Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2, September 2014 Hlm. 183-199. (Online)
6	Nugroho & Rohman (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)	Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.	Variabel Kinerja Keuangan dan menggunakan metode analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS).	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah	Fakultas Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-14. (Online)
7	Desmawati Ayu, et al. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota	Menganalisis pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah.	Variabel jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 1, Juli-September 2015. (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	di Provinsi Jambi			Provinsi Jambi	
8	Ilham, (2022). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat	Menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah serta menggunakan n analisis regresi berganda.	Variabel jumlah penduduk sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel belanja modal.	PDRB dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat	E-Skripsi, Universitas Andalas. 20 Oktober 2022. Skripsi (Online)
9	Murib, Demitianus, et al. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2007-2016	Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan n analisis regresi berganda.	Variabel Jumlah Penduduk dan Pendapatan per Kapita sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal.	PDRB tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi. Volume 18, No. 01, Tahun 2018. (Online)
10	Tampubolon, L, T & Ariadi, Wa, (2023). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua	Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan n analisis regresi berganda .	Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor dan PDRB di Provinsi DKI Jakarta.	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Di Provinsi Papua	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Januari 2023, pp. 25-31. (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Amelia, D. N., Nurlina, Miswar, Nurfiani Syamsuddin, & Sufitrayati. (2023). Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh	Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan model analisis linier berganda.	Variabel Inflasi sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal.	PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh	Jurnal Sociohumani ora Kodepena (JSK) , 4(2), 174 -182. (Online)
12	Adriani,Evi & Handayani, Sri Indah. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin	Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan model analisis linier berganda.	Jumlah penduduk sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal.	Produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.8 No.2 Juli Tahun 2008. (Online)
13	Edira, Rosalia. (2023). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur	Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan model analisis linier berganda.	Variabel belanja pegawai dan jumlah penduduk.	Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota/Kabupaten Di Jawa Timur	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, volumr.12 Tahun 2023. (online)
14	Batik, Karlina. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk,	Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah	Variabel Investasi, Jumlah Penduduk, Penerimaan	PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.11 No.01 Juni 2013. (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat	dan menggunakan model analisis linier berganda.	Pembangunan dan Inflasi.		
15	Pribadi, Maulana Sienyantoro, et al. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah dan menggunakan model analisis linier berganda.	Variabel Investasi dan Pertambahan Penduduk.	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) 3, No. 4 November (2018). (Online)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Pada penelitian ini, penulis mengambil 3 variabel bebas yaitu laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal serta manfaat dengan satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah Jakarta

### 2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Menurut Halim (2004), bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh PDRB. Sedangkan pendapat lain menyatakan, desentralisasi juga memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi (Lin & Liu, 2000). Menurut Pribadi, et al., (2018) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan, mulai banyaknya pendirian usaha baru yang berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat sehingga pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak dan retribusi

Syahroni, et al., (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan dari jenis lapangan usaha pada PDRB memiliki kontribusi besar pada pendapatan asli daerah, terutama sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta pada sektor perdagangan besar, eceran mobil dan sepeda motor. Semakin baik pertumbuhan ekonomi melalui PDRB maka semakin baik pula pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan Wadjaudje, et al., (2018) dimana PDRB selalu mengalami peningkatan karena hampir semua sektor tumbuh positif.

### **2.2.2 Hubungan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah kendaraan yang banyak di suatu daerah juga berarti ada kebutuhan yang tinggi akan tempat parkir. Pemerintah daerah biasanya menetapkan retribusi parkir untuk kendaraan bermotor yang berlaku di area-area tertentu. Dengan banyaknya motor, retribusi parkir dari pemilik motor yang harus membayar untuk mengakses dan menggunakan tempat parkir ini akan menyumbang PAD kab/kota. Selain itu, tingginya jumlah kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota melalui bagi hasil pajak dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan beroperasi di daerah tersebut, penerimaan PKB dari pemerintah provinsi juga akan meningkat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi yang dikenakan setiap kendaraan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Meningkatnya penerimaan PKB sebagai hasil dari tingginya jumlah kendaraan bermotor berdampak positif pada PAD kabupaten/kota. Bagian dari pendapatan PKB yang menjadi bagi hasil akan menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan kelanjutan (Rahman & Restiatun, 2023).

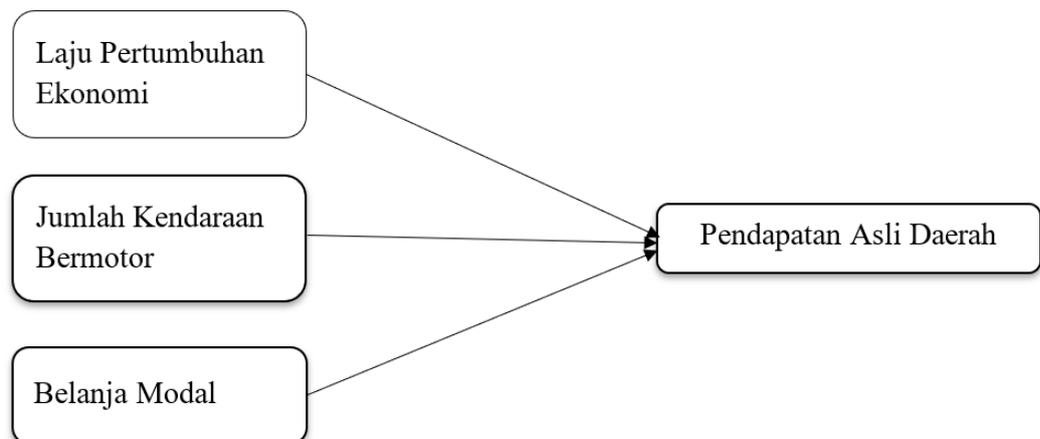
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilham (2022) yang menemukan bahwa kendaraan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2014. Semakin banyak jumlah kendaraan

bermotor maka selain akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rachman dan Restiatun (2023) bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.

### **2.2.3 Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah**

Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal pada anggaran pendapatan belanja daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

Dalam Penelitian Novita, et al., (2016) belanja modal dapat memengaruhi PAD melalui pengelolaan pembangunan di daerah dalam memberikan fasilitas untuk masyarakat sehingga masyarakat akan membayar pajak dan retribusi. Penjelasan ini sesuai dengan penelitian Darwanis dan Saputra (2014) dimana pembangunan infrastruktur yang dibuat untuk publik yang akan meningkatkan PAD melalui retribusi dan pajak. Sehingga pelayanan publik yang tinggi akan meningkatkan PAD. Hasil penelitian ini selaras juga dengan Tampubolon, et al., (2023) bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Papua.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan yang bersifat sementara dan dianggap benar, agar dapat ditarik konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya, dapat menggunakan data-data hasil penelitian. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial diduga laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009-2022.
2. Secara bersama diduga laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009-2022.